

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 181/PMK.06/2016

TENTANG  
KEUANGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA  
FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)  
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KPU KOTA TANJUNGPINANG PERIODE SEMESTER II TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A Dasar Hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum laporan Barang Milik Negara meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2014 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 51);

## B. Entitas Pelaporan

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

KPKNL Batam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang KPU Kota Tanjungpinang tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor

57/PB/2013 tentang pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### C . Periode Laporan

- Periode Laporan Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semester II Tahun anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang.

## II . KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

### III . PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Semester II Tahun anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester II tahun anggaran 2022 ini adalah sebesar Rp.1.952.663.400,- ( *satu milyar sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga ribu empat empat ratus rupiah* ), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 1.952.663.400,- ( *satu milyar sembilan ratus lima puluh dua ribu* ), dan nilai mutasi kurang 0 yang terjadi selama periode Semester I 2021 sebesar Rp.0 nilai mutasi tambah Rp. 0 yang terjadi selama periode Semester I Tahun anggaran 2021 Rp.0,- tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode berjalan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) ;
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ;
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYB D S ) ;
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK- SIMAK pada periode semester I Tahun anggaran 2019
14. Laporan PNB P yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021

1. Saldo Awal Semester II Tahun Anggaran 2021

Nilai BMN per 30 Juni Tahun 2021 pada KPU Kota Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 1.952.663.000- (*satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 1.952.663.400- (*satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,- (*0 rupiah*)

##### A. BARANG PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 76.420.812,- (*Tujuh Puluh Enam juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 76.420.812,- (*Tujuh Puluh Enam juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) dan total mutasi kurang 0 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2019	1,228,178,998	(716,380,415)	36.84
2	2019	1,228,178,998	929,410,954	75.67
3	2020	1,952,663,400	838,571,318	68.28
4	2020	1,952,663,400	1,514,624,019	77.57
5	2021	1,952,663,400	1,480,634,366	75.83
6	2021	1,952,663,400	1,565,333,772	80.16

Dari nilai persediaan diatas terdapat mutasi kurang yaitu terdapat barang persediaan yang diusangkan berupa Kotak Suara yang sedang dalam proses Verifikasi lelang di KPKNL Batam, tetapi keadaan disaat pandemi lelang untuk pertama gagal dikarenakan belum ada pembeli,

adapun rincian terdiri dari yang terdiri dari :

1. Kotak Suara jumlah : 1781 x Rp.141.900 =Rp. 252.723.900

Sudah dimusnahkan sesuai dengan surat edaran KPU RI dan telah dilelang

Sedangkan untuk Bilik suara alumunium masih menunggu proses lelang . Adapun rincian bilik sebagai berikut :  
 2.Bilik Suara jumlah : 1482 x Rp. 51.566 =Rp. 76.420.812  
 Bilik suara tidak musnahkan karena masih digunakan.

NAMA BARANG	Jumlah satuan	Jumlah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
<i>bilik suara</i>	1,482	51,566	76,420,812
JUMLAH	1,482	(76,419,330)	76,420,812

Kotak dan Bilik suara berbahan kardus perolehan Tahun 2018 dengan dari KPU RI sudah tidak digunakan lagi dan merupakan barang habis pakai. Dan tidak tertuang lagi didalam neraca nilai sebagai berikut :

NAMA BARANG	Jumlah satuan	Jumlah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
<i>Kotak suara</i>	2,849	86,900	247,578,100
<i>bilik suara</i>	762	35,200	26,822,400
JUMLAH	3,611	(274,396,889)	274,400,500

Khususnya kotak dan bilik berbahan kardus akan dihapuskan dengan menimbang kembali jumlah kotak suara dan bilik yang masih bisa untuk dihapuskan.dan menunggu proses lelang.

## B. TANAH

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan total mutasi Tanah selama periode laporan sebesar Rp. .0,- (*Nol Rupiah*). Tanah pada pembangunan gudang logistik masih pinjam pakai oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Nomor : 548/PEM/2005 tanggal 10 September 2005 tentang Lahan Pembangunan Gudang KPU Kota Tanjungpinang.

KPU Kota Tanjungpinang masih menyewa Ruko untuk Gedung Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Baik	..... (52)	..... (52)
Rusak Ringan	..... (52)	..... (52)
Rusak Berat	..... (52)	..... (52)

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah .... (53)... m2/Rp ...(53)....

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang tetapi bangunan dan gudang masih mempunyai asset KPU Kota Tanjungpinang yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Sengketa	.....	.....
Tidak terdapat Dokumen Kepemilikan	150m2.	258.785.000
Dikuasai pihak lain	..... (56)	..... (56)
.....	..... (57)	..... (57)

### c. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung berupa Gudang Logistik KPU Kota Tanjungpinang pada laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.,- tidak ada mutasi kurang maupun tambah sampai per 31 Desember 2021 dengan nilai 0. Bangunan didirikan diatas lahan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah kota Tanjungpinang yang berada di Senggarang dan bangunan di dirikan sesuai dengan Nomor SPK : 02/SPK/KPU/Kota-TPI/X/2005 dengan luas 150M2 tanggal kontrak 31 Oktober 2005 selama 60 (eman Puluh) hari kalender. Gudang KPU Yang statusnya untuk tanah masih dipijam pakai oleh pemerintah Kota Tanjungpinang sedangkan untuk bangunannya milik KPU kota Tanjungpinang. Tetapi Bukti pinjam pakai tidak ada Bukti hanya kontrak Pembangunan KPU.



Mutasi Tambah ... (59) (*sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan*) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Gedung KPU	258.785.000	258.785.000,-

Mutasi Kurang gedung bangunan (*sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan*) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Dari jumlah Gedung dan bangunan (*sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan*) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar

Dari jumlah Gedung dan bangunan (*sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut*) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	308.448.000,-	308.448.000,-
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Untuk Gedung dan bangunan Akumulasi penyusutan Saldo Akhir pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semester II tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 37.013.760,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.32.901.120,-, (*Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp.4.112.640,-, (*Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

**D. PERALATAN DAN MESIN**

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Semester I Tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.952.663.400,- (*satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.952.663.400,- (*satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp.0,- (*Nol rupiah*),- dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

1). Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Untuk Peralatan Mesin Akumulasi penyusutan Saldo Akhir pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semester II tahun anggaran 2021 adalah sebesar,- 1.565.333.772,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah ), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 1.480.634.366,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) mutasi tambah sebesar Rp. 84.699.406- ( Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 ( nol ).

1). Dari jumlah alat besar darat dan alat bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	Rp 1,565,333,772	1,565,333,772
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Akumulasi penyusutan alat besar darat dan alat bantu pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna semester II tahun anggaran 2021 sebesar Rp.0,- (0 rupiah).

Uraian Jenis Transaksi	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan mesin	1,952,663,400	1,565,333,772	387,329,628

**E. ASET LAINNYA**

Barang dalam aplikasi bmn terdapat barang aset lainnya berupa barang yang tidak dapat lagi digunakan pada operasi pemerintahan yang telah diraklas antara lain pada Per Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.10.910.000,- ( Sepuluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah ) dan

tidak ada mutasi tambah Dengan nilai Rp.0 dan Mutasi Kurang dengan nilai Rp.0, Adapun barang yang tidak lagi dalam operasi pemerintahan antara lain sebagai berikut:

No	Nama barang	Jumlah Rusak berat	Jumlah @(Rp)	Total Rp
1	Printer	4 unit	2.674.000	10.696.000
2	Pesawat Telepon NUP.1	1 Unit	214.000,-	214.000
	Total			10.910.000

Sedangkan akumulasi penyusutan untuk aset lainya berupa barang yang tidak dapat lagi digunakan pada operasi pemerintahan yang telah diraklas antara lain pada Per juni 2019 dengan nilai sebesar Rp.10.910.000,- ( Sepuluh juta sembilan ratus Sepuluh ribu rupiah ) dan tidak ada mutasi tambah Dengan nilai Rp.0 dan Mutasi Kurang dengan nilai Rp.0,

### 3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester II Tahun anggaran 2021

#### a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester II tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 735.184.680 ( tujuh ratus tiga puluh lima Ribu seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh rupiah) , nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar						
bahan baku konsumsi	-					
Persediaan	76,420,812	3.27	-	0		
Sub Jumlah (1)	76,420,812	3.27	-	0	76,420,812	3.27
Aset Tetap						
Peralatan Mesin	1,952,663,400	83.54	-	0	1,952,663,400	83.54
Gedung & bangunan	308,448,000	13.20	-	0	308,448,000	13.20
Sub Jumlah (2)	2,261,111,400	96.73	-	0	2,261,111,400	96.73
<b>Total</b>	<b>2,337,532,212</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2,337,532,212</b>	<b>100</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester II tahun anggaran 2021 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>Aset Tetap</b>						
Peralatan Mesin	1,952,663,400	85.94	-	0	1,952,663,400	99.44
Gedung & bangunan	308,448,000	13.58	-	-	308,448,000	15.71
Sub Jumlah (1)	2,261,111,400	85.94	-	0	1,952,663,400	99.44
<b>Aset Linnya</b>						
Aset lain-lain	10,910,000				10,910,000	
Sub Jumlah (2)						
<b>Total</b>	<b>2,272,021,400</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,963,573,400</b>	<b>99</b>

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan  
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester II tahun anggaran 2021 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	76,420,812	76,420,812	-
2	Peralatan dan Mesin	1,952,663,400	1,952,663,400	-
	<b>Total</b>	<b>2,029,084,212</b>	<b>2,029,084,212</b>	

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

Demikian Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) pada KPU Kota Tanjungpinang untuk periode Laporan per 31 Desember 2021 ini

2012	1,253,082,900		
2013	1,594,260,300	341,177,400	27.23
2014	731,225,419	(863,034,881)	-54.13
2015	623,359,350	(107,866,069)	-14.75
2016	552,333,088	(71,026,262)	-11.39
2017	515,887,600	(36,445,488)	-6.60
2018	746,792,476	230,904,876	44.76
2019	929,410,954	182,618,478	24.45
2020	823,996,726	(105,414,228)	-14.12
2021	735,184,680	(88,812,046)	-9.56

Demikian dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Laporan Barang Kuasa Pengguna  
Semester II Tahun anggaran 2021

Sekretaris

KPU KOTA TANJUNGPINANG



(Drs. H. ABDUL BASYID, MH)

NIP. 19641115 198703 1016